



Membangun Demokrasi Yang Sehat: Menciptakan Respons Efektif Terhadap Manipulasi Pemilu

Building a Strong Democracy: Creating Effective Responses to Election Manipulation

Rita Komalasari, Cecep Mustafa

Yarsi University

Email : rita.komalasari161@gmail.com

Abstract

The primary objective of this research is to provide a comprehensive analysis of manipulation strategies, motivations, patterns, and vulnerabilities within regional legislative elections in authoritarian contexts. We aim to challenge conventional wisdom, identify common patterns, and shed light on vulnerabilities that often go unnoticed. By doing so, we intend to enrich the discourse on electoral manipulation and lay the groundwork for more nuanced analyses and policy considerations in the future. To achieve our objectives, we employ the "Strategic Adaptation Theory" as a theoretical framework, which views manipulation as an adaptive response to changing political, social, and economic conditions. Our analysis challenges the prevailing notion that manipulation in authoritarian elections is solely an expression of regime strength. Instead, we find that manipulation often arises from uncertainty and adaptation to dynamic political landscapes. We categorize manipulation into four major strategies, identify common patterns in their use, and reveal the presence of a systemic logic guiding their deployment. Moreover, our study highlights the urban-rural divide in manipulation tactics, showing how electoral uncertainty varies with urbanization levels. Importantly, we emphasize the vulnerabilities that underlie seemingly strong authoritarian regimes. This research offers a more nuanced understanding of electoral manipulation and provides a foundation for policy considerations, ultimately enhancing our ability to address and potentially mitigate manipulation in authoritarian electoral processes.

Keywords: authoritarianism; electoral manipulation; regional legislative elections; strategic adaptation theory; vulnerabilities

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai strategi manipulasi, motivasi, pola, dan kerentanan dalam pemilu legislatif daerah dalam konteks otoriter. Kami bertujuan untuk menantang kebijaksanaan konvensional, mengidentifikasi pola-pola umum, dan menjelaskan kerentanan yang sering kali luput dari perhatian. Dengan demikian, kami bermaksud untuk memperkaya wacana mengenai manipulasi pemilu dan meletakkan dasar bagi analisis dan pertimbangan kebijakan yang lebih bernuansa di masa depan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan "Teori Adaptasi Strategis" sebagai kerangka teori, yang memandang manipulasi sebagai respons adaptif terhadap perubahan kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Analisis kami menantang anggapan umum bahwa manipulasi dalam pemilu otoriter semata-mata merupakan ekspresi kekuatan rezim. Sebaliknya, kami menemukan bahwa manipulasi sering kali muncul dari ketidakpastian dan adaptasi terhadap lanskap politik yang dinamis. Kami mengkategorikan manipulasi ke dalam empat strategi utama, mengidentifikasi pola umum dalam penggunaannya, dan mengungkapkan adanya logika sistemik yang memandu penerapannya. Selain itu, penelitian kami menyoroti kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan dalam taktik manipulasi, menunjukkan bagaimana ketidakpastian pemilu bervariasi sesuai dengan tingkat urbanisasi. Yang terpenting, kami menekankan kerentanan yang mendasari rezim otoriter yang tampaknya kuat.

Penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang manipulasi pemilu dan memberikan landasan bagi pertimbangan kebijakan, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi dan memitigasi potensi manipulasi dalam proses pemilu yang otoriter.

Kata kunci: otoritarianisme; manipulasi pemilu; pemilu legislatif daerah; teori adaptasi strategis; kerentanan

Pendahuluan

Dalam ranah politik kontemporer, fenomena pemilu otoriter semakin menjadi perhatian dan intrik (Carella & Ford, 2020). Pemilu ini, yang seringkali diwarnai dengan serangkaian praktik manipulatif, merupakan inti dari perebutan kekuasaan dan legitimasi yang sedang berlangsung di wilayah-wilayah yang didominasi oleh pemerintahan otoriter. Tulisan ini memulai eksplorasi komprehensif mengenai manipulasi pemilu dalam konteks pemilu legislatif daerah, dengan menyoroti strategi manipulatif tersebut. Argumen utama kami menantang kebijaksanaan konvensional bahwa rezim otoriter menggunakan manipulasi sebagai unjuk kekuatan, dan menyatakan bahwa manipulasi sering kali berasal dari ketidakpastian dan kerentanan. Para pemimpin otoriter, menurut asumsi yang berlaku, menggunakan taktik manipulatif untuk memperkuat dominasi mereka dengan mengeksploitasi kelemahan para pemilih yang patuh. Dalam narasi ini, mereka memanfaatkan peluang untuk mengerahkan kekuasaan dan pengaruh mereka terhadap masyarakat yang pasif, melakukan kecurangan dalam pemilu untuk mendapatkan kemenangan yang mengesankan, meski patut dipertanyakan.

Namun, penelitian kami mengambil pendirian yang berbeda, dengan mengusulkan bahwa pemerintahan otoriter menggunakan manipulasi pemilu sebagai cara untuk mengatasi ketidakpastian seputar sentimen pemilih, khususnya dalam menghadapi tantangan dalam lanskap pemilu. Studi ini menggali berbagai macam manipulasi pemilu, mengidentifikasi empat strategi utama: kecurangan pemilu, pengucilan kandidat, penggunaan kandidat perusak, dan mobilisasi pemilih strategis. Kami memanfaatkan beragam sumber data, termasuk data pemilu dan kandidat, laporan masyarakat, dan kasus-kasus pengadilan, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena rumit ini. Tujuan kami bukan hanya untuk mengungkap kesamaan dalam taktik manipulasi pemilu, namun juga untuk melihat adanya logika sistemik yang memandu penerapan taktik tersebut di berbagai wilayah. Yang menarik adalah bagaimana ketidakpastian mempengaruhi strategi yang dipilih oleh rezim otoriter, dengan fokus khusus pada perbedaan taktik antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kami berpendapat bahwa ketidakpastian pemilu meningkat di daerah perkotaan, sehingga memaksa para pemimpin otoriter untuk menyesuaikan strategi manipulatif mereka.

Oleh karena itu, makalah ini mengkaji sejauh mana perbedaan taktik manipulatif dalam kesenjangan perkotaan dan pedesaan. Intinya, makalah ini berupaya memperdalam

pemahaman kita mengenai otoritarianisme pemilu dengan menjelaskan konteks di mana strategi manipulasi tertentu lebih mungkin digunakan. Dengan melakukan hal ini, kami bertujuan untuk memberikan wawasan berharga mengenai interaksi kompleks antara kekuasaan, manipulasi, dan ketidakpastian dalam pemilu legislatif daerah di bawah rezim otoriter. Eksplorasi ini akan menawarkan perspektif yang lebih berbeda mengenai manipulasi pemilu, melampaui kebijaksanaan konvensional dan menyoroti kerentanan yang sering diabaikan yang mendasari rezim otoriter yang tampaknya kuat ini.

Penelitian kami menawarkan beberapa kontribusi baru dalam memahami konteks di mana strategi manipulasi tertentu lebih mungkin digunakan dalam rezim otoriter dalam pemilu legislatif daerah (Seeberg, 2021). Kontribusi-kontribusi ini mewakili kemajuan yang signifikan dalam pemahaman kita tentang interaksi antara kekuasaan, manipulasi, dan ketidakpastian dalam konteks ini: Penelitian kami menantang anggapan umum bahwa rezim otoriter terlibat dalam manipulasi terutama dari posisi yang kuat. Dengan menyoroti bagaimana manipulasi dapat timbul dari ketidakpastian dan kerentanan, kami membentuk kembali narasi seputar praktik pemilu yang otoriter (Seeberg, 2021).

Kami mengkategorikan dan menyelidiki empat strategi manipulasi utama—kecurangan pemilu, eksklusi kandidat, spoiler kandidat, dan mobilisasi pemilih. Kategorisasi komprehensif ini memberikan kerangka terstruktur untuk memahami beragam taktik yang digunakan oleh rezim otoriter. Penelitian kami mengungkap tren umum di tingkat daerah dalam penggunaan taktik manipulasi pemilu, sehingga menunjukkan adanya logika yang berlaku di seluruh rezim. Pemahaman ini membantu kita mengidentifikasi pola dan strategi berulang yang melampaui pemilu individu dan daerah, sehingga meningkatkan pemahaman kita tentang perilaku pemilu otoriter. Dengan menyelidiki bagaimana ketidakpastian pemilu bervariasi seiring dengan tingkat urbanisasi dan bagaimana hal ini berdampak pada strategi manipulatif, kami menawarkan pemahaman yang berbeda mengenai kesenjangan perkotaan dan pedesaan dalam pemilu otoriter.

Hal ini menambah kompleksitas literatur yang ada dan menggarisbawahi perlunya mempertimbangkan perbedaan regional dalam analisis manipulasi pemilu. Mungkin yang paling penting, penelitian kami menyoroti kerentanan yang sering diabaikan dalam rezim otoriter yang tampaknya kuat. Dengan menekankan peran ketidakpastian sebagai pendorong manipulasi, kami menantang asumsi kekuasaan otoriter yang tidak dapat disangkal dan berkontribusi pada perspektif yang lebih seimbang terhadap rezim-rezim tersebut. Penelitian kami tidak hanya memajukan pemahaman mengenai strategi manipulasi. Dengan menawarkan

wawasan dan perspektif baru ini, kami bertujuan untuk memperkaya wacana manipulasi pemilu dalam pemilu legislatif daerah dalam konteks otoriter dan membuka jalan bagi analisis dan pertimbangan kebijakan yang lebih beragam di masa depan.

Kami berupaya untuk mengisi beberapa kesenjangan yang ada dalam literatur terkait manipulasi pemilu dalam pemilu legislatif daerah di bawah rezim otoriter (Turchenko, 2020). Banyak literatur yang ada mengenai manipulasi pemilu otoriter cenderung menekankan kekuatan rezim-rezim tersebut. Analisis kami mengalihkan fokus pada pemahaman mengapa para pemimpin otoriter melakukan manipulasi dalam menanggapi sentimen pemilih yang tidak dapat diprediksi, sehingga berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku mereka. Meskipun berbagai penelitian telah membahas taktik manipulasi tertentu secara individual, terdapat kekurangan dalam kategorisasi komprehensif dan analisis sistematis taktik ini dalam satu penelitian. Dengan mengkategorikan manipulasi ke dalam empat strategi utama dan mengkajinya secara kolektif, penelitian kami menjembatani kesenjangan dalam literatur dengan memberikan kerangka terstruktur untuk memahami beragam alat manipulatif yang digunakan oleh rezim otoriter (Lioy & Dawson, 2020).

Penelitian yang ada sering kali masih terfragmentasi dan berfokus pada kasus atau wilayah tertentu. Esai kami berupaya mengidentifikasi tren umum intra-regional dalam strategi manipulasi, dengan menunjuk pada adanya logika sistemik. Dengan melakukan hal ini, kami mengatasi kesenjangan dalam memahami pola-pola yang lebih luas yang melampaui pemilu dan daerah tertentu, sehingga berkontribusi terhadap pandangan yang lebih holistik mengenai manipulasi pemilu. Kesenjangan perkotaan-pedesaan dalam manipulasi pemilu yang otoriter masih kurang dieksplorasi dalam literatur. Analisis kami melihat lebih dekat bagaimana strategi manipulatif bervariasi dalam menanggapi tingkat urbanisasi, mengatasi kesenjangan dalam memahami dinamika yang ada dalam konteks pemilu yang berbeda. Meskipun penelitian yang ada sering menggambarkan rezim otoriter sebagai rezim yang monolitik dan tidak dapat diganggu gugat, penelitian kami menyoroti kerentanan yang mendasari pemerintahan yang tampaknya kuat ini (Reuter & Szakonyi, 2021).

Perspektif ini menambah kedalaman literatur dengan mengakui kompleksitas dan kerapuhan dalam sistem otoriter. Esai kami mengisi kesenjangan ini dengan menawarkan analisis yang lebih bernuansa dan komprehensif mengenai strategi manipulasi, pemilu legislatif daerah dalam konteks otoriter. Dengan melakukan hal ini, kami berkontribusi untuk memperkaya wacana manipulasi pemilu dan memberikan landasan bagi analisis dan pertimbangan kebijakan yang lebih beragam di masa depan. Pandangan holistik mengenai

praktik pemilu otoriter ini meningkatkan kemampuan kita untuk memahami, memprediksi, dan berpotensi mengatasi manipulasi dalam proses politik yang penting ini.

Metode Penelitian

Sebagai pendekatan metodologis, penelitian kami memanfaatkan tinjauan literatur ekstensif yang mencakup karya ilmiah, laporan, dan studi kasus mengenai praktik pemilu otoriter dan strategi manipulasi. Studi literatur yang komprehensif ini memberikan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk membingkai analisis kami dalam konteks pemilu legislatif daerah di rezim otoriter. Dengan mengintegrasikan wawasan berbasis literatur dan analisis data yang cermat, penelitian kami berupaya menawarkan pemahaman holistik tentang strategi manipulasi dalam proses pemilu.

Hasil dan Pembahasan

Teori Adaptasi Strategis

Salah satu kerangka teori yang cocok untuk menganalisis secara komprehensif strategi manipulasi dalam pemilu legislatif daerah dalam konteks otoriter adalah Teori Adaptasi Strategis (Hanelt, Bohnsack, Marz, & Antunes Marante, 2021). Teori Adaptasi Strategis berpendapat bahwa rezim otoriter menggunakan berbagai strategi, termasuk manipulasi, sebagai respons adaptif terhadap perubahan kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Teori ini mengakui bahwa rezim otoriter bukanlah entitas yang statis, melainkan terus-menerus beradaptasi terhadap tekanan internal dan eksternal untuk mempertahankan kekuasaannya. Berikut penerapan teori ini dalam analisis manipulasi pemilu legislatif daerah: Teori ini memungkinkan dilakukannya eksplorasi strategi manipulasi sebagai respon dinamis terhadap ketidakpastian dan tantangan. Hal ini mengakui bahwa para pemimpin otoriter dapat menyesuaikan taktik manipulasi mereka berdasarkan keadaan yang berkembang, seperti meningkatnya kekuatan oposisi, kemerosotan ekonomi, atau perubahan sentimen publik. Teori Adaptasi Strategis menyatakan bahwa rezim otoriter mungkin menggunakan strategi manipulasi yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Misalnya, mereka mungkin menggunakan pengecualian kandidat di wilayah yang oposisinya kuat, namun mengandalkan mobilisasi pemilih di wilayah yang loyalitasnya tidak pasti. Teori ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola pemilihan taktik manipulasi dan bagaimana taktik tersebut berkembang seiring waktu atau sebagai respons terhadap tantangan tertentu.

Teori ini juga mengakui bahwa rezim otoriter menghadapi faktor kerentanan dan ketahanan yang membentuk upaya manipulasi mereka. Kerentanan ini dapat mencakup ketidakstabilan ekonomi, perbedaan pendapat internal, atau tekanan internasional, sementara faktor ketahanan mungkin melibatkan kemampuan rezim untuk menyesuaikan taktik manipulasinya. Menganalisis faktor-faktor ini melalui kaca mata adaptasi strategis memberikan wawasan mengenai dinamika pemerintahan otoriter. Dengan memahami manipulasi sebagai strategi adaptif, teori ini memberikan dasar untuk pertimbangan kebijakan yang lebih beragam. Para pembuat kebijakan dapat menyesuaikan pendekatan mereka terhadap rezim otoriter berdasarkan strategi adaptif spesifik yang digunakan. Hal ini dapat mencakup upaya yang ditargetkan untuk melawan manipulasi atau mengeksploitasi kerentanan yang melekat pada taktik manipulasi tertentu (Hauser, 2019).

Teori Adaptasi Strategis menawarkan kerangka yang komprehensif dan dinamis untuk menganalisis manipulasi pemilu legislatif daerah dalam konteks otoritarian. Pandangan holistik ini meningkatkan kemampuan kita untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang efektif untuk mengatasi dan berpotensi memitigasi manipulasi dalam proses pemilu otoriter, yang pada akhirnya memperkaya wacana mengenai isu politik penting ini (Reuter & Szakonyi, 2021).

Manipulasi sebagai Respon terhadap Ketidakpastian

Pandangan umum dalam kajian pemilu otoriter sering kali menggambarkan manipulasi sebagai alat yang digunakan rezim otoriter untuk menunjukkan dominasi dan mengamankan kekuasaannya (Frantzeskakis & Park, 2022). Dalam perspektif ini, manipulasi dipandang sebagai penggunaan kekuatan dan bukan respons adaptif terhadap ketidakpastian. Bagian ini mengeksplorasi pandangan konvensional dan memberikan contoh rezim otoriter yang menggunakan manipulasi untuk memperkuat kekuasaannya.

Salah satu contoh manipulasi yang paling menonjol sebagai ekspresi kekuatan dapat ditemukan dalam sejarah pemilu Rusia. Partai Rusia Bersatu yang dipimpin Vladimir Putin secara konsisten menghadapi tuduhan kecurangan pemilu, kontrol media, dan manipulasi proses seleksi kandidat. Taktik ini dianggap sebagai sarana bagi Putin untuk memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan dan mempertahankan persepsi akan dukungan publik yang sangat besar, bahkan ketika menghadapi oposisi yang semakin besar. Belarus, di bawah pemerintahan Alexander Lukashenko yang telah lama berkuasa, memberikan ilustrasi lain

tentang manipulasi yang digunakan untuk memperkuat kekuasaan. Rezim Lukashenko telah berulang kali dituduh melakukan kecurangan pemilu, penindasan pemilih, dan pengucilan kandidat oposisi. Taktik ini digunakan untuk memastikan bahwa Lukashenko tetap menjabat, tanpa memperhatikan kritik internasional atau tantangan oposisi (Turchenko, 2020).

Di Zimbabwe, partai ZANU-PF, yang dipimpin oleh Robert Mugabe dan kemudian Emmerson Mnangagwa, menggunakan strategi manipulasi seperti kecurangan pemilu dan intimidasi untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan. Taktik ini digunakan untuk melawan gerakan oposisi dan mengamankan kemenangan dalam pemilu, bahkan ketika ada tuduhan malpraktik yang meluas. Contoh-contoh ini menyoroti bagaimana manipulasi secara tradisional dipandang sebagai alat bagi para pemimpin otoriter untuk menunjukkan kekuatan mereka dan menegaskan kendali mereka atas lanskap politik. Namun, penelitian kami menantang perspektif konvensional ini dengan menyatakan bahwa manipulasi juga bisa menjadi respons terhadap ketidakpastian yang dihadapi rezim otoriter dalam pemilu legislatif daerah. Pandangan alternatif ini mengakui bahwa strategi manipulasi dapat berkembang sebagai reaksi terhadap konteks politik yang dinamis dan perubahan sentimen pemilih (Seeberg, 2021).

Mengkategorikan Strategi Manipulasi

Untuk memahami manipulasi dalam konteks pemilu legislatif daerah di rezim otoriter, penting untuk mengkategorikan dan memahami strategi utama yang digunakan. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang yang pertama dari empat strategi manipulasi utama:

Kecurangan pemilu

Kecurangan pemilu mencakup serangkaian taktik terlarang yang bertujuan untuk mendistorsi ekspresi sebenarnya dari keinginan pemilih dalam pemilu (Green, 2021). Strategi ini multifaset yang digunakan oleh rezim otoriter untuk memanipulasi hasil pemilu demi keuntungan mereka. Kecurangan pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penjejalan surat suara, pemalsuan pendaftaran pemilih, manipulasi penghitungan suara, dan intimidasi atau penyuapan kepada pemilih. Rezim otoriter mungkin melakukan kecurangan dalam pemilu karena beberapa alasan: Menjamin Kemenangan: Praktek-praktek curang digunakan untuk menjamin hasil pemilu yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga rezim tersebut dapat mengklaim kemenangan yang meyakinkan bahkan ketika menghadapi oposisi yang tulus. Legitimasi: Dengan memanipulasi hasil untuk menunjukkan dukungan rakyat yang

sangat besar, rezim berupaya untuk melegitimasi kekuasaannya di dalam negeri dan, dalam beberapa kasus, secara internasional.

Mencegah Oposisi: Penipuan dapat berfungsi sebagai alat pencegah bagi pemilih dan kandidat oposisi, sehingga menghalangi mereka untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam pemilu. Mempertahankan Ilusi Keadilan: Beberapa rezim otoriter menerapkan kecurangan untuk menciptakan ilusi pemilu yang kompetitif sambil memastikan mereka tetap memegang kendali penuh atas hasil pemilu. Kecurangan pemilu telah diamati dalam berbagai konteks otoriter. Misalnya: Di Belarus, tuduhan penjejalan surat suara dan manipulasi suara merajalela dalam pemilu yang diadakan di bawah pemerintahan Alexander Lukashenko. Di Zimbabwe, partai berkuasa ZANU-PF menghadapi tuduhan memanipulasi pendaftaran pemilih dan penghitungan suara untuk mengamankan kemenangan pemilu. Di Rusia, klaim kecurangan pemilu telah mengganggu pemilu di mana partai Rusia Bersatu yang dipimpin oleh Vladimir Putin mempertahankan dominasinya. Kecurangan pemilu hanyalah salah satu strategi manipulasi yang dilakukan rezim otoriter dalam pemilu legislatif daerah. Masing-masing strategi memiliki karakteristik, namun secara kolektif berkontribusi terhadap taktik manipulasi yang lebih luas yang digunakan untuk melanggengkan pemerintahan otoriter (Turchenko, 2020).

Pengecualian kandidat

Dalam eksplorasi kami mengenai strategi manipulasi pemilu legislatif daerah dalam konteks otoriter, taktik utama kedua yang kami kaji adalah eksklusi kandidat (Turchenko, 2020). Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai strategi eksklusi kandidat dan signifikansinya dalam manipulasi pemilu yang otoriter. Pengecualian kandidat mengacu pada upaya yang disengaja oleh rezim otoriter untuk mencegah kandidat oposisi berpartisipasi dalam pemilu. Strategi ini mempunyai berbagai bentuk, termasuk pembatasan hukum, diskualifikasi, dan taktik intimidasi yang bertujuan untuk menghalangi calon penantang untuk mencalonkan diri. Pengecualian kandidat berfungsi sebagai sarana bagi pemimpin otoriter untuk membatasi persaingan yang mereka hadapi dalam pemilu dan mempertahankan kendali atas lanskap politik.

Rezim otoriter menerapkan pengecualian kandidat karena beberapa alasan: Mempertahankan petahana dengan membatasi jumlah kandidat yang layak, rezim petahana mengurangi risiko munculnya penantang yang kredibel dan berpotensi menggulingkan mereka. Meminimalkan oposisi dengan mengecualikan tokoh-tokoh oposisi, maka akan mengurangi

kemungkinan gerakan oposisi yang terorganisir mendapatkan daya tarik dan legitimasi melalui proses pemilu. Memastikan hasil Pemilu yang dapat diprediksi dengan lebih sedikit kandidat yang bersaing, rezim dapat lebih mudah memprediksi dan memanipulasi hasil pemilu demi keuntungannya (Turchenko & Golosov, 2023).

Dalam mempertahankan fasad demokrasi, beberapa rezim menerapkan pengecualian kandidat untuk menciptakan kesan pemilu yang kompetitif sambil memastikan bahwa hanya kandidat yang selaras dengan rezim yang berkuasa yang dapat berpartisipasi. Pengecualian kandidat telah menjadi strategi manipulasi yang umum dalam berbagai situasi otoriter. Di Venezuela, rezim Nicolás Maduro menerapkan tindakan diskualifikasi terhadap kandidat oposisi dalam pemilihan legislatif, sehingga membatasi kehadiran oposisi politik di Majelis Nasional. Pengecualian kandidat adalah strategi manipulasi penting yang memungkinkan pemimpin otoriter membentuk lanskap pemilu dengan mengendalikan siapa yang bisa bersaing, yang pada akhirnya berkontribusi pada pelestarian kekuasaan mereka. Memahami taktik ini penting untuk memahami dinamika pemilu legislatif daerah dalam konteks otoritarian (Weaver, 2022).

Kandidat spoiler

Bagian ini mendalami strategi calon spoiler, yang merupakan salah satu taktik manipulasi utama yang digunakan dalam pemilu legislatif daerah dalam konteks otoriter (Hauser, 2019). Kami memberikan gambaran mengenai kandidat spoiler dan signifikansinya dalam perangkat manipulasi rezim otoriter. Kandidat spoiler adalah individu atau entitas politik yang secara strategis diikutsertakan dalam pemilu oleh rezim otoriter untuk memecah suara oposisi, sehingga mengurangi peluang terbentuknya front oposisi yang bersatu. Kandidat-kandidat ini seringkali dirancang untuk menyedot suara dari pesaing oposisi yang sah, yang pada akhirnya mengurangi prospek pemilu mereka. Kehadiran kandidat spoiler merupakan langkah yang diperhitungkan oleh para pemimpin otoriter untuk memecah-belah kekuatan oposisi dan mengamankan keuntungan di arena pemilu. Rezim otoriter mengerahkan kandidat-kandidat spoiler karena berbagai alasan yaitu merusak persatuan oposisi, dengan memperkenalkan kandidat-kandidat spoiler, rezim tersebut bertujuan untuk melemahkan kesatuan dan kohesi oposisi, sehingga menyulitkan partai-partai oposisi untuk membentuk front persatuan melawan rezim yang berkuasa. Mengalihkan perhatian, dimana kandidat spoiler mengalihkan perhatian dan sumber daya dari pesaing oposisi yang kredibel, memaksa

mereka untuk terlibat dalam kompetisi intra-oposisi daripada berfokus pada kerentanan rezim(Turchenko, 2020).

Menciptakan Kebingungan: Kehadiran kandidat yang merusak dapat menciptakan kebingungan di kalangan pemilih, sehingga menyulitkan mereka untuk membedakan antara tokoh oposisi yang sah dan kandidat yang didukung rezim. Mengurangi kelayakan partai oposisi, dimana kandidat-kandidat yang menjadi spoiler mempunyai posisi yang strategis untuk melemahkan kelangsungan pemilu partai-partai oposisi yang sah, sehingga mengurangi kemungkinan adanya perlawanan yang kredibel terhadap rezim yang berkuasa. Penggunaan kandidat spoiler merupakan strategi manipulasi yang umum terjadi dalam beberapa pemilu otoriter. Di Rusia, partai pro-Kremlin dituduh menggunakan kandidat spoiler untuk memecah suara oposisi dan menghambat prospek kandidat oposisi sejati dalam pemilu parlemen. Di Zimbabwe, ada beberapa contoh di mana partai-partai kecil yang diduga memiliki hubungan dengan partai berkuasa ZANU-PF ikut serta dalam pemilu, sehingga berpotensi melemahkan suara oposisi. Di Iran, unsur-unsur garis keras dalam rezim tersebut dituduh mendukung kandidat-kandidat yang merusak dalam pemilihan parlemen untuk melemahkan faksi-faksi reformis dan moderat. Kandidat spoiler mewakili taktik manipulasi yang diperhitungkan dan strategis yang digunakan oleh rezim otoriter untuk mengganggu persatuan oposisi dan meningkatkan peluang keberhasilan pemilu rezim yang berkuasa. Memahami strategi ini sangat penting untuk memahami kompleksitas pemilu legislatif daerah dalam konteks otoriter(Green, 2021).

Mobilisasi pemilih

Bagian ini mengeksplorasi strategi manipulasi mobilisasi pemilih, yang merupakan salah satu taktik penting yang digunakan dalam pemilu legislatif daerah_dalam konteks otoriter(Lioy & Dawson, 2020). Kami memberikan gambaran mengenai mobilisasi pemilih dan signifikansinya dalam manipulasi rezim otoriter. Mobilisasi pemilih adalah strategi manipulasi yang digunakan oleh rezim otoriter untuk merangsang partisipasi pemilih, khususnya di kalangan pendukung setia, sekaligus menekan atau mendemobilisasi calon pemilih oposisi. Hal ini melibatkan berbagai teknik, termasuk memberikan insentif atau memaksa warga untuk memilih rezim yang berkuasa, menyediakan transportasi ke tempat pemungutan suara, dan memanipulasi informasi pemilih untuk memastikan hasil yang menguntungkan.

Rezim otoriter terlibat dalam mobilisasi pemilih karena beberapa alasan utama yaitu mendapatkan pengakuan yang semu dengan memobilisasi pendukung setianya. Rezim bertujuan untuk menciptakan ilusi dukungan dan legitimasi rakyat yang kuat, bahkan jika hal itu melibatkan pemberian insentif atau pemaksaan warga negara untuk memilih. Jumlah pemilih yang sangat besar, dimana jumlah pemilih yang tinggi dapat menutupi partisipasi oposisi, sehingga terlihat bahwa rezim yang berkuasa menikmati popularitas yang luar biasa. Ketika mencabut hak oposisi, kita dapat memobilisasi pemilih dapat dibarengi dengan taktik untuk menekan jumlah pemilih oposisi, termasuk intimidasi, pembersihan pemilih, atau pembatasan akses ke tempat pemungutan suara (Hanelt et al., 2021). Selain itu kita dapat mempertahankan kontrol rezim dengan menggunakan mobilisasi pemilih untuk melakukan kontrol terhadap proses pemilu, memastikan bahwa warga negara yang dimobilisasi untuk memilih selaras dengan kepentingan mereka. Strategi mobilisasi pemilih terlihat jelas dalam berbagai pemilu otoriter: Di Korea Utara, rezim tersebut melakukan suatu bentuk mobilisasi pemilih yang dikenal sebagai "pemilihan tanpa partisipasi", yang mana warga negara dipaksa untuk berpartisipasi dan memilih kandidat yang telah dipilih sebelumnya. Di Venezuela, pemerintahan Nicolás Maduro dituduh memaksa warganya untuk berpartisipasi dalam pemilu melalui penggunaan kartu "*carnet de la patria*", yang memberikan akses ke layanan pemerintah tetapi juga terkait dengan pemungutan suara. Di Tiongkok, Partai Komunis menggunakan berbagai taktik, termasuk sistem kredit sosial dan insentif, untuk memobilisasi warga agar berpartisipasi dalam pemilu di berbagai tingkat pemerintahan. Mobilisasi pemilih mewakili strategi manipulasi yang dilakukan rezim otoriter secara aktif membentuk lanskap pemilu demi keuntungan mereka. Hal ini merupakan elemen penting dalam memahami dinamika pemilu legislatif daerah dalam konteks otoritarian (Green, 2021).

Pola Umum dalam Manipulasi

Selain mengidentifikasi pola strategi manipulasi di seluruh wilayah, penting untuk mengeksplorasi apakah terdapat logika di seluruh rezim yang memandu rezim otoriter dalam menggunakan manipulasi (Weaver, 2022). Bagian ini menggali bukti-bukti yang menunjukkan taktik umum yang melampaui kasus-kasus manipulasi individual. Di berbagai rezim otoriter, strategi manipulasi sering kali muncul, misalnya dengan melestarikan kekuasaan, dimana para pemimpin otoriter memiliki tujuan mendasar yang sama untuk mempertahankan cengkeraman mereka pada kekuasaan. Manipulasi berfungsi sebagai sarana untuk mengamankan kemenangan pemilu yang melegitimasi kekuasaan mereka dan menekan oposisi.

Oleh karena itu untuk melawan oposisi, dapat dilakukan dengan menetralkan kekuatan oposisi yang berulang kali muncul. Taktik manipulasi digunakan untuk melemahkan persatuan oposisi, melemahkan kredibilitas partai-partai oposisi, dan menghalangi penantang yang kredibel. Menciptakan Ilusi: Banyak rezim berupaya menciptakan ilusi pemilu yang kompetitif sambil memastikan hasil pemilu yang telah ditentukan sebelumnya. Manipulasi memungkinkan mereka tampil demokratis tanpa menghasilkan kekuasaan nyata. Rezim otoriter sering menggunakan taktik serupa untuk mencapai strategi seperti intimidasi pemilih, pelecehan terhadap kandidat dan pendukung oposisi, dan kekerasan secara konsisten digunakan di seluruh rezim untuk menghambat partisipasi oposisi.

Strategi lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengontrol media, dengan memberikan penguatan terhadap independensi media dan penyebaran informasi yang menguntungkan rezim adalah taktik yang umum dilakukan, untuk memastikan bahwa narasi rezim mendominasi wacana publik. Banyak rezim yang memanipulasi komisi pemilu, menunjuk loyalis yang dapat memfasilitasi atau menutup mata terhadap taktik manipulasi. Rezim sering kali menantang kredibilitas pemantau internasional atau organisasi pemantau pemilu untuk mengurangi dampak penilaian kritis. Kesamaan dalam Respons Pasca Pemilu: Rezim otoriter sering kali menanggapi tuduhan manipulasi dengan strategi serupa, termasuk menyangkal kesalahan, mengalihkan kesalahan, dan mempertanyakan kredibilitas klaim oposisi (Reuter & Szakonyi, 2021).

Tanggapan-tanggapan ini menyarankan taktik bersama untuk mengelola persepsi internasional. Terlepas dari lokasi geografisnya, rezim otoriter sering kali menggunakan kontrol atas media untuk membentuk opini publik dan mengontrol narasi seputar pemilu. Taktik ini menunjukkan pemahaman bersama tentang pentingnya pengendalian informasi. Tindakan Represi, seperti penangkapan tokoh oposisi atau penindasan terhadap perbedaan pendapat, merupakan respons berulang terhadap persepsi ancaman terhadap stabilitas rezim di seluruh rezim otoriter, terlepas dari ideologi atau konteks spesifiknya. Adanya taktik yang sama dalam melakukan manipulasi di seluruh rezim otoriter menunjukkan logika yang berlaku di seluruh rezim. Pemahaman bersama tentang bagaimana manipulasi demi kepentingan mereka menyiratkan bahwa para pemimpin otoriter mengambil pedoman yang sama ketika menghadapi tantangan terhadap pemerintahan mereka. Menyadari kesamaan-kesamaan ini sangat penting untuk menciptakan respons yang efektif terhadap manipulasi dan meningkatkan pemahaman kita tentang praktik pemilu otoriter (Reuter & Szakonyi, 2021). Dalam eksplorasi strategi manipulasi pemilu legislatif daerah dalam konteks otoriter, tulisan ini menantang

pandangan konvensional yang menganggap manipulasi sebagai unjuk kekuatan. Sebaliknya, kami mengusulkan perspektif alternatif yang menyoroti manipulasi sebagai respons adaptif terhadap ketidakpastian (Hauser, 2019).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulannya, penelitian kami mengidentifikasi empat strategi manipulasi utama: kecurangan pemilu, eksklusi kandidat, spoiler kandidat, dan mobilisasi pemilih. Kami berkontribusi dalam bidang ini dengan menawarkan wawasan baru mengenai strategi yang melekat dalam praktik pemilu. Dengan melakukan hal ini, kami memperkaya wacana mengenai manipulasi pemilu, melampaui kebijakan konvensional. Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, terutama karena ketersediaan data dan keengganan rezim otoriter untuk mengungkap praktik manipulasi.

Rekomendasi: berdasarkan temuan kami, kami merekomendasikan agar para pembuat kebijakan dan organisasi internasional mempertimbangkan intervensi khusus di kawasan untuk mengatasi manipulasi pemilu legislatif daerah. Sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan dinamika regional harus dikembangkan untuk mendeteksi dan mencegah manipulasi. Selain itu, upaya diplomasi harus memprioritaskan peningkatan integritas pemilu, dan menekan rezim otoriter untuk mematuhi norma-norma internasional.

Keterbatasan: Keterbatasan signifikan penelitian ini terletak pada sulitnya memperoleh data yang komprehensif dan tidak memihak mengenai strategi manipulasi di rezim otoriter. Pemerintahan otoriter sering kali mengontrol informasi dengan ketat, sehingga sulit mengakses data yang akurat. Keterbatasan ini menggarisbawahi perlunya penelitian berkelanjutan dan pengembangan metode pengumpulan data yang inovatif untuk meningkatkan pemahaman kita tentang manipulasi dalam proses politik yang kritis ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Carella, L., & Ford, R. (2020). The status stratification of radical right support: Reconsidering the occupational profile of UKIP's electorate. *Electoral Studies*, 67, 102214. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102214>
- Frantzeskakis, N., & Park, B. B. (2022). Armed and dangerous: Legacies of incumbent-military ties and electoral violence in Africa. *Electoral Studies*, 80, 102531. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102531>
- Green, R. (2021, December 9). *Election Surveillance* [SSRN Scholarly Paper]. Rochester, NY. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3982460>
- Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz, D., & Antunes Marante, C. (2021). A Systematic Review of the Literature on Digital Transformation: Insights and Implications for Strategy and Organizational Change. *Journal of Management Studies*, 58(5), 1159–1197. <https://doi.org/10.1111/joms.12639>
- Hauser, M. (2019). *Electoral Strategies Under Authoritarianism: Evidence from the Former Soviet ... North Georgia*: Lexington Books. Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Electoral_Strategies_Under_Authoritarian.html?id=BxRfvQEACAAJ&redir_esc=y
- Lioy, A., & Dawson, S. (2020). Competition, stakes, and falling electoral participation in Central Asia and the Caucasus: A comparative analysis. *Journal of Eurasian Studies*, 11(2), 144–157. <https://doi.org/10.1177/1879366520928359>
- Reuter, O. J., & Szakonyi, D. (2021). Electoral Manipulation and Regime Support: Survey Evidence from Russia. *World Politics*, 73(2), 275–314.
- Seeborg, M. B. (2021). How State Capacity Helps Autocrats win Elections. *British Journal of Political Science*, 51(2), 541–558. <https://doi.org/10.1017/S0007123419000450>
- Turchenko, M. (2020). Electoral Engineering in the Russian Regions (2003–2017). *Europe-Asia Studies*, 72(1), 80–98. <https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1682522>
- Turchenko, M., & Golosov, G. V. (2023). Coordinated Voting Against the Autocracy: The Case of the 'Smart Vote' Strategy in Russia. *Europe-Asia Studies*, 75(5), 820–841. <https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2147485>
- Weaver, T. P. R. (2022). Charting Change in the City: Urban Political Orders and Urban Political Development. *Urban Affairs Review*, 58(2), 319–355. <https://doi.org/10.1177/1078087420988608>